SJEE (Scientific Journals of Economic Education)
Volume 9 Nomor 2, September 2025: 243-251
Online ISSN: 2597-8853(Online), https://www.doi.org/10.33087/sjee

Studi Kasus Perlindungan Sosial Melalui PKH, BLT, dan BSU: Upaya Mengurangi Ketergantungan Pinjaman pada Masyarakat Rentan di Kota Jambi

Redi Indra Yudha*[1], Lukman Hakim[2], Muhammad Sabandi[3]
[1,2,3] Economic Education Program Study, FKIP, UNS, Surakarta
*Correspondence email: redi.indra.yudha@student.uns.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana program perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) diimplementasikan sebagai instrumen pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu di Kota Jambi, khususnya dalam upaya mengurangi ketergantungan mereka terhadap praktik pinjaman informal maupun pinjaman berbunga tinggi. Mengacu pada pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif Campbell, penelitian ini menekankan penggambaran fenomena secara naratif dan kontekstual melalui studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penerima manfaat, perangkat desa, serta petugas pendamping sosial di tiga kelurahan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan program PKH, BLT, dan BSU telah memberikan manfaat nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, terutama kebutuhan pangan dan pendidikan anak. Hal ini berdampak pada menurunnya frekuensi masyarakat rentan untuk melakukan pinjaman berbunga tinggi yang umumnya ditujukan untuk menutup kebutuhan konsumsi mendesak.

Kata Kunci: PKH; BLT; BSU; Ketergantungan Pinjaman; Masyarakat Rentan.

Abstract. *This study aims to understand in depth how social protection programs in the form of the Family Hope Program (PKH), Direct Cash Assistance (BLT), and Wage Subsidy Assistance (BSU) are implemented as social security instruments for underprivileged communities in Jambi City, particularly in an effort to reduce their dependence on informal lending practices and high-interest loans. Referring to Campbell's descriptive qualitative research method approach, this study emphasizes the narrative and contextual depiction of phenomena through case studies. Data were collected through in-depth interviews with beneficiaries, village officials, and social assistance officers in three sub-districts with the highest poverty rates in Jambi City. The results show that the existence of the PKH, BLT, and BSU programs has provided tangible benefits in meeting basic household needs, especially food and children's education. This has resulted in a decrease in the frequency of vulnerable communities taking out high-interest loans, which are generally intended to cover urgent consumption needs.*

Keywords: *PKH, BLT, BSU, Loan Dependence, Vulnerable Communities.*

PENDAHULUAN

Tingkat literasi suatu bangsa sering dijadikan indikator penting untuk menilai sejauh mana prospek modernisasi, perkembangan peradaban, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara dapat direalisasikan (Rajesh et al., 2023). Di Indonesia, upaya untuk menjamin hak pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara dihadapkan pada tantangan ketimpangan sosial ekonomi yang masih cukup tajam, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Prasangka dan stigma terhadap lapisan ekonomi terbawah seringkali membuat mereka terjebak pada pola keterbatasan akses, baik pada pendidikan maupun peluang ekonomi produktif. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah pusat telah berupaya memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui skema Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, dalam konteks daerah yang masih memiliki kantong-kantong kemiskinan seperti di Kota Jambi, kebijakan fiskal yang ada belum sepenuhnya efektif menanggulangi kemiskinan struktural di tingkat rumah tangga, khususnya di wilayah perdesaan dan kantong permukiman rentan (Arham et al., 2024).

Konsep kesejahteraan yang berakar pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bukan sekadar pertumbuhan angka, telah lama dikemukakan oleh Daly (1980). Hal ini memperkuat kritik terhadap pandangan para ekonom neo-klasik yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi otomatis akan menjadi solusi atas kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan seperti diibaratkan melalui pepatah "ketika ombak datang, semua perahu terangkat" (Anderson, 2012). Dalam konteks Indonesia, upaya menjamin kesejahteraan masyarakat dan mempersempit kesenjangan sosial diimplementasikan melalui berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Ketiga program ini dirancang untuk memberikan jaring pengaman ekonomi bagi kelompok rentan, khususnya dalam menghadapi kondisi krisis seperti pandemi COVID-19, ketidakstabilan ekonomi, atau lonjakan harga kebutuhan pokok.

Tujuan utama dari program bantuan keuangan seperti PKH, BLT, dan BSU bagi masyarakat kurang mampu adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dasar dengan keterbatasan pendapatan yang mereka miliki. Bantuan ini diharapkan tidak hanya membantu menutup defisit keuangan rumah tangga, tetapi juga mendukung keberlanjutan akses pendidikan dan kesejahteraan sosial penerima manfaat (Rajesh et al., 2023). Namun demikian, sebagaimana diungkapkan oleh Rossevelt (2023) dalam penelitiannya *Analisis Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa*, persoalan implementasi di lapangan masih diwarnai ketidaktepatan sasaran dan pola penyaluran yang kurang efektif dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. Selain itu, Halim et al. (2024) menyoroti bahwa kegiatan sosialisasi program perlindungan sosial seringkali hanya dilakukan melalui pertemuan kelompok tanpa dukungan materi tertulis atau program literasi keuangan yang memadai, sehingga tujuan mengurangi ketergantungan masyarakat pada praktik pinjaman belum sepenuhnya tercapai.

Kota Jambi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tetap menghadapi tantangan sosial yang kompleks, seperti kemiskinan struktural, tingginya pengangguran terbuka, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan data BPS Kota Jambi (2023), tercatat lebih dari 30 ribu penduduk hidup dalam kondisi miskin, sebagian besar bekerja di sektor informal dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. Dalam konteks tersebut, kehadiran program perlindungan sosial seperti PKH, BLT, dan BSU memainkan peran penting sebagai penyangga ekonomi rumah tangga rentan sekaligus instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian penerima manfaat di Kota Jambi belum sepenuhnya memahami mekanisme, tujuan, dan potensi program perlindungan sosial yang mereka terima melalui PKH, BLT, dan BSU. Kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan, minimnya literasi keuangan, serta pola konsumsi rumah tangga yang masih cenderung konsumtif menjadi tantangan dalam memastikan bantuan ini benar-benar dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal. Dalam beberapa kasus, dana bantuan justru digunakan untuk pengeluaran non-esensial yang tidak mendukung perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, maupun penguatan ketahanan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Selain itu, dapat ditunjukkan bahwa ketergantungan pada pinjaman informal masih tinggi. Hasil wawancara di beberapa kelurahan padat penduduk memperlihatkan bahwa 40%–50% rumah tangga miskin pernah atau rutin berutang, baik melalui rentenir, pinjaman online ilegal, maupun koperasi harian berbunga tinggi. Pinjaman ini umumnya digunakan bukan untuk usaha produktif, tetapi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pola ini menjerat keluarga miskin dalam lingkaran utang yang sulit diputus.

Tabel 1. Tabel Ringkasan Temuan

Aspek	Data Utama Kota Jambi	Dampak Terhadap Pinjaman
Tingkat Kemiskinan	7,45% penduduk (BPS 2023)	Rentan meminjam untuk konsumsi
Tingkat Pinjaman	± 40% rumah tangga rentan berutang	Lingkaran utang konsumtif
Penerima PKH	± 18.000 keluarga	Pengurangan pinjaman konsumtif

Aspek	Data Utama Kota Jambi	Dampak Terhadap Pinjaman
Penerima BLT	± 12.000 keluarga	Membantu biaya kebutuhan pokok
Penerima BSU	Ribuan pekerja sektor informal	Mengurangi pinjaman saat penghasilan berkurang

Sumber: BPS Kota Jambi Tahun 2025.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa PKH, BLT, dan BSU berperan sebagai bantalan sosial yang menekan kebutuhan masyarakat rentan untuk mencari pinjaman konsumtif. Akan tetapi, tantangan tetap ada: besaran bantuan relatif terbatas, periodisasi penyaluran masih berjarak panjang, dan literasi keuangan keluarga penerima masih rendah. Hal ini menegaskan pentingnya strategi perlindungan sosial terpadu yang tidak hanya menyalurkan bantuan tunai, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan usaha mikro, dan pendampingan manajemen keuangan keluarga agar ketergantungan pinjaman dapat benar-benar ditekan secara berkelanjutan.

Tabel 2. Tabel Ringkasan Temuan

Keterangan	Jumlah Penerima	Persentase Rumah Tangga Masih Berutang
PKH	18.000	25%
BLT	12.000	30%
BSU	5.000+	35%
Bukan Penerima	-	50%

Sumber: BPS Kota Jambi Tahun 2025.

Dari hasil wawancara dan FGD, banyak keluarga penerima menyatakan bahwa bantuan tunai ini mampu meringankan beban kebutuhan dasar (pangan, biaya sekolah, kesehatan dasar) sehingga frekuensi mereka meminjam berkurang. Namun demikian, bantuan yang terbatas dan tidak rutin juga membuat sebagian masyarakat tetap mencari pinjaman di sela periode jeda penyaluran. Penelitian Hanlon et al., (2010) membuktikan bahwa transfer tunai bersyarat (*conditional cash transfers* / CCT) memang efektif menutupi kebutuhan dasar. Namun, masih jarang kajian mendalam di level daerah perkotaan (konteks Kota Jambi) yang memotret *seberapa jauh jumlah & ketepatan waktu penyaluran* memengaruhi perilaku pinjaman keluarga miskin. Studi di negara lain, misalnya di Meksiko dan Filipina, menunjukkan bahwa jeda penyaluran bantuan membuat keluarga miskin kembali mengakses pinjaman informal (Pellerano et al., 2016; Angeles et al., 2019). Namun, di Indonesia, *evidence* spesifik di tingkat kota apalagi dengan fokus pada jeda penyaluran PKH, BLT, BSU masih terbatas. Selain itu, literatur internasional banyak menyoroti pentingnya *complementary measures* (Pelham, 2007; Davis et al., 2016) agar *cash transfer* tidak hanya berhenti pada konsumsi, tetapi juga mendukung pembiayaan produktif.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian perlindungan sosial dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dan penggambaran fenomena secara kontekstual. Integrasi tiga program bantuan (PKH, BLT, dan BSU) ke dalam satu kerangka analisis memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana kebijakan perlindungan sosial diterapkan sebagai upaya menekan ketergantungan pinjaman di kalangan masyarakat rentan di Kota Jambi. Temuan ini menegaskan pentingnya kajian empiris untuk memahami bagaimana penerima manfaat memaknai, menerima, dan memanfaatkan bantuan sosial, sekaligus menilai sejauhmana program-program tersebut benar-benar mampu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Pertanyaan mendasar yang muncul mencakup: apakah PKH, BLT, dan BSU efektif mendukung penurunan praktik pinjaman berbunga tinggi? Bagaimana pengalaman subjektif penerima manfaat dalam proses memperoleh dan menggunakan bantuan? Dan, sejauhmana mekanisme penyaluran bantuan sudah berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas bagi masyarakat miskin di Kota Jambi?

Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *Conditional Cash Transfer* (CCT). Konsep ini mengacu pada praktik pemberian bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat tertentu, seperti kewajiban memastikan anak-anak bersekolah, rutin

memeriksakan kesehatan ibu dan balita, atau mengikuti program gizi. Menurut Fiszbein & Schady (2009) dalam *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*, CCT bertujuan ganda yaitu mengurangi kemiskinan saat ini (*current poverty alleviation*) melalui transfer tunai langsung, dan mengurangi kemiskinan masa depan (*breaking the intergenerational poverty cycle*) melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Di beberapa negara seperti Meksiko (*Progresa/Oportunidades*) dan Brasil (*Bolsa Família*), CCT telah terbukti meningkatkan partisipasi sekolah, kunjungan posyandu, dan status gizi (Handa & Davis, 2006; Bastagli et al., 2016).

Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *wage subsidy* atau *wage top-up*, bentuk intervensi pemerintah untuk membantu pekerja bergaji rendah agar tetap bekerja dan menjaga konsumsi rumah tangga di tengah tekanan ekonomi.Browne & Immervoll (2017) dalam *Mechanics of Wage Subsidies* menekankan bahwa subsidi upah membantu perusahaan menekan PHK massal, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja berupah minimum. Secara konseptual, masyarakat rentan merujuk pada individu atau kelompok rumah tangga yang memiliki risiko tinggi jatuh ke dalam kemiskinan karena keterbatasan sumber pendapatan tetap, kurangnya aset produktif, dan minimnya akses layanan dasar. United Nations Development Programme (UNDP, 2022) menambahkan bahwa kerentanan juga dipengaruhi faktor struktural seperti pekerjaan informal, status jaminan sosial, dan akses terhadap pembiayaan produktif.

Dengan demikian, PKH, BLT, dan BSU di Indonesia dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan sosial tunai yang berperan penting sebagai pengurang risiko ketergantungan pada pinjaman informal, terutama bagi masyarakat rentan yang berada dalam kondisi pendapatan tidak menentu. Namun, penelitian lintas negara menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan sosial tunai akan jauh lebih berkelanjutan bila diintegrasikan dengan literasi keuangan, akses usaha mikro, dan strategi pemberdayaan keluarga miskin.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Campbell & Pederson (2001), dalam kerangka *Comparative Political Economy*, penelitian kualitatif deskriptif yang baik memadukan analisis mendalam kasus nyata, data naratif, dan interpretasi kontekstual untuk membongkar bagaimana kebijakan berjalan di level praktik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga rentan di beberapa wilayah Kota Jambi yang terdaftar sebagai penerima manfaat program PKH, BLT, dan BSU. Untuk mendapatkan pemahaman mendalam, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan kunci yang memenuhi kriteria: 1) Penerima bantuan PKH/BLT/BSU minimal selama 2 tahun berturut-turut, 2) Pernah mengalami ketergantungan pada pinjaman informal, dan 3) Terlibat aktif dalam diskusi kelompok atau kegiatan komunitas penerima manfaat. Sampel diperkirakan terdiri dari 5-10 rumah tangga di beberapa Kelurahan pada penduduk (mewakili rumah tangga dengan kondisi ekonomi rentan dengan riwayat pinjaman konsumtif sebelum menerima bantuan tunai) sebagai penerima manfaat, ditambah pejabat lokal, pendamping PKH, dan pengurus RT/RW sebagai informan pendukung. Adapun indikator analisis merujuk pada Rajesh, et, al (2023) terkait kontinuitas bantuan, kecukupan nominal, perilaku keuangan rumah tangga, dan persepsi keberlanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontinuitas Bantuan

Mayoritas rumah tangga penerima manfaat di Kota Jambi menyatakan bahwa jadwal penyaluran bantuan PKH, BLT, dan BSU pada prinsipnya sudah sesuai rencana pemerintah pusat, namun dalam praktiknya sering mengalami keterlambatan di tingkat administrasi lokal, terutama pada tahap verifikasi data keluarga penerima dan penyesuaian rekening bank. Situasi ini berdampak pada penundaan pencairan, khususnya untuk BLT penanganan inflasi, yang menjadi salah satu bantuan andalan keluarga rentan untuk kebutuhan mendesak. Misalnya, SN (36) seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Kasang, penerima PKH sejak 2021, menyebutkan *"Kalau uang PKH lancar, bisa buat beli beras sama bayar SPP anak. Tapi kemarin data kami dicek ulang, jadi*

cairnya telat. Terpaksa saya pinjam dulu ke koperasi harian." MH (40) penerima BLT penanganan inflasi di Kecamatan Kotabaru menyampaikan *"BLT inflasi kemarin itu banyak yang mundur jadwalnya, katanya datanya belum sinkron. Kami yang butuh cepat ya bingung, akhirnya pinjam sama keluarga."*

Sementara itu, seorang LS (32) pendamping PKH di Kecamatan Jelutung menambahkan *"Proses update data kadang butuh waktu lama. Ada yang rekeningnya bermasalah, ada juga yang pindah domisili. Kalau telat cair, mereka tetap cari utangan untuk belanja harian."* Seorang pengurus RT di kawasan Danau Sipin juga menuturkan *"Bantuan BLT waktu Covid cepat cair. Tapi yang inflasi ini kemarin banyak warga yang komplain karena pencairan mundur hampir sebulan. Jadi warga balik lagi minjam ke tetangga."* Temuan ini menegaskan temuan bahwa meskipun program bantuan tunai di Kota Jambi secara umum membantu mengurangi frekuensi pinjaman, ketidakpastian penyaluran di lapangan tetap mendorong keluarga rentan memanfaatkan pinjaman informal di sela-sela masa tunggu bantuan.

Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan pada mekanisme pendataan, verifikasi, serta penyaluran yang lebih tepat waktu agar tujuan perlindungan sosial benar-benar tercapai dan mengurangi ketergantungan pada utang berbiaya tinggi. Temuan ini sejalan dengan temuan Rajesh et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kontinuitas penyaluran sangat menentukan efektivitas program transfer tunai dalam mengurangi ketergantungan pada pinjaman rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal serupa juga diungkapkan olehHanlon et al. (2010) dalam studi di beberapa negara berkembang, yang menyebutkan bahwa keandalan jadwal penyaluran merupakan elemen kunci keberhasilan transfer tunai, dan Pellerano & Barca (2016) juga menyoroti pentingnya *predictability* dalam transfer tunai agar penerima dapat merencanakan keuangan keluarga dengan lebih baik dan tidak kembali jatuh ke jerat pinjaman informal.

Dengan demikian, Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa masalah kontinuitas (kelancaran) dan ketepatan waktu pencairan masih menjadi faktor krusial. Jika penyaluran tepat waktu dan akurat, penerima tidak perlu kembali meminjam untuk kebutuhan pokok. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara BLT adalah program dengan tingkat risiko paling tinggi menimbulkan ketergantungan pinjaman bagi keluarga rentan, diikuti oleh PKH, sedangkan BSU paling kecil efeknya. Maka, integrasi program pemberdayaan agar bantuan tunai benar-benar mendukung kemandirian ekonomi, bukan justru membuat penerima kembali terjebak pada pola pinjaman harian.

2. Kecukupan Nominal

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan penerima manfaat di Kota Jambi sepakat bahwa nominal bantuan tunai dari program PKH, BLT, dan BSU terbukti membantu meringankan beban pengeluaran kebutuhan dasar, khususnya untuk biaya pangan, pendidikan anak, dan kebutuhan kesehatan mendesak. Namun demikian, besar nominal bantuan tersebut belum sepenuhnya cukup untuk menutup kebutuhan total rumah tangga setiap bulannya, terutama bagi keluarga dengan anggota yang banyak dan penghasilan tidak tetap. Dalam beberapa wawancara mendalam, penerima manfaat rata-rata menyebutkan bahwa sekitar 50–70% dari dana bantuan tunai dialokasikan untuk kebutuhan pangan pokok, seperti beras, lauk pauk, dan kebutuhan dapur lainnya, sedangkan sisanya biasanya digunakan untuk membayar biaya sekolah anak, membeli perlengkapan sekolah, atau kebutuhan mendesak seperti obat-obatan.

Salah satu informan, MR (61) seorang ibu rumah tangga penerima PKH di Kelurahan Kasang Jambi Timur, menyampaikan *"Kalau PKH cair, biasanya langsung untuk beli beras, gula, dan bayar iuran sekolah anak. Kalau nggak ada PKH, terpaksa saya minjam sama tetangga dulu. Tapi kadang bantuan datangnya telat."* Hal serupa juga diungkapkan oleh DR (55) penerima BLT di Kecamatan Jambi Selatan *"Alhamdulillah terbantu untuk makan sama bayar sekolah. Tapi kalau anak sakit, saya tetap harus pinjam, karena uang bantuan habis untuk makan."*. Sementara, Pendamping PKH di salah satu Kecamatan menambahkan *"Kadang nominalnya*

cukup kalau untuk satu-dua anak. Tapi kalau anak banyak atau penghasilan suami tidak tetap, tetap saja harus pinjam." Temuan ini menjelaskan bahwa meskipun bantuan tunai PKH, BLT, dan BSU di Kota Jambi terbukti relevan untuk mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga rentan, namun keterbatasan nominal bantuan dan ketidakteraturan penyaluran masih membuat sebagian keluarga tetap bergantung pada pinjaman, terutama untuk kebutuhan darurat di luar rencana. Hal ini menjadi masukan penting bagi kebijakan perlindungan sosial ke depan, agar tidak hanya fokus pada penyaluran tunai, tetapi juga pada penguatan pendampingan ekonomi produktif dan literasi keuangan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rajesh et al. (2023) yang menunjukkan bahwa program transfer tunai memang efektif mengurangi beban pinjaman rumah tangga untuk kebutuhan konsumsi, tetapi belum mampu mengurangi ketergantungan pinjaman sepenuhnya, khususnya bila nominal bantuan tidak disertai penopang pendapatan produktif atau mekanisme penguatan literasi keuangan. Hasil ini juga didukung oleh studi Fiszbein & Schady (2009) yang menyatakan bahwa program perlindungan sosial seperti PKH atau BLT di banyak negara berkembang umumnya hanya cukup untuk menutupi sebagian kebutuhan dasar, tetapi tidak cukup untuk investasi produktif jangka panjang.

Dengan demikian, PKH memberikan efek paling besar dalam menekan ketergantungan pinjaman, karena terhubung dengan pembinaan keluarga melalui pendamping sosial, meski nominalnya masih terbatas. BLT memiliki efek tertinggi dalam meningkatkan ketergantungan pinjaman jika tidak diimbangi dengan sumber penghasilan alternatif, karena sifatnya insidental. Adapun BSU tidak secara langsung menyasar rumah tangga non-pekerja formal, sehingga efeknya terhadap ketergantungan pinjaman masyarakat rentan di Jambi relatif rendah dibandingkan PKH dan BLT.

3. Perilaku Keuangan Rumah Tangga

Hasil penelitian ini menemukan pola menarik dalam perilaku keuangan rumah tangga penerima manfaat. Sebelum memperoleh bantuan PKH, BLT, atau BSU, sebagian besar informan bergantung pada pinjaman informal seperti rentenir atau koperasi harian untuk memenuhi kebutuhan pangan, biaya sekolah anak, atau pengeluaran mendesak lainnya. Setelah menerima bantuan tunai, frekuensi pengambilan pinjaman menurun signifikan, terutama untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Namun demikian, dalam kondisi darurat seperti saat anggota keluarga sakit mendadak atau terjadi kenaikan harga bahan pokok praktik meminjam tetap muncul karena nominal bantuan belum sepenuhnya menutup kebutuhan tak terduga yang sifatnya insidental. LS (33) Seorang Ibu di Kecamatan Jambi Selatan, menyampaikan *"Kalau belum ada BLT, saya sering pinjam ke koperasi harian, kadang ke rentenir. Sekarang kalau BLT turun, buat makan sama sekolah anak, jadi pinjamnya nggak sering lagi."* Selain itu, AR (42) penerima PKH di Kawasan Pasar Ancol Kota Jambi mengatakan, *"Kalau pas bantuan telat, ya terpaksa hutang lagi. Pernah suami masuk rumah sakit, harus pinjam Rp 2 juta. Bantuan nggak cukup buat biaya mendadak kayak gitu."*.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi Rajesh et al. (2023) yang menunjukkan bahwa di banyak wilayah Asia Selatan, program *cash transfer* memang efektif mengurangi beban pinjaman keluarga miskin untuk kebutuhan konsumsi, tetapi tidak secara otomatis menghapus ketergantungan pinjaman, terutama jika nominal bantuan relatif kecil dan tidak rutin. Rajesh et al. menekankan bahwa untuk meminimalkan ketergantungan pinjaman, perlindungan sosial harus diintegrasikan dengan mekanisme penanganan risiko darurat seperti asuransi kesehatan mikro atau tabungan kelompok. Hal senada juga diungkapkan Hanlon et al. (2010) dalam *Just Give Money to the Poor*, yang menunjukkan bahwa bantuan tunai bersifat positif untuk kebutuhan dasar, tetapi rentan gagal menekan utang jika tidak didukung strategi pendampingan keuangan dan literasi pengelolaan dana.

Dengan demikian, program bantuan tunai seperti BLT memang berkontribusi langsung dalam meringankan beban kebutuhan dasar rumah tangga, khususnya untuk kebutuhan harian seperti konsumsi keluarga dan biaya pendidikan anak. Selain itu, BLT berperan signifikan sebagai substitusi pengeluaran harian, sehingga frekuensi pinjaman ke lembaga informal seperti rentenir dapat ditekan. Namun, wawancara kedua juga menyoroti kelemahan mendasar yaitu ketidakrutinan dan nominal yang terbatas, sehingga saat kebutuhan mendadak muncul, keluarga tetap terjebak pada pinjaman baru. Maka, BLT dapat disimpulkan sebagai instrumen perlindungan sosial dengan dampak paling langsung dalam menekan praktik pinjaman mikro sehari-hari, terutama di kalangan rumah tangga rentan yang sebelumnya sangat bergantung pada rentenir atau pinjaman koperasi harian.

4. Persepsi Keberlanjutan

Mayoritas informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa bantuan tunai seperti PKH, BLT, dan BSU memang mampu memberikan rasa aman secara temporer, khususnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pangan, biaya sekolah, dan pengobatan. Namun demikian, keraguan terhadap keberlanjutan manfaat bantuan masih kuat, terutama karena minimnya pendampingan untuk mengembangkan modal produktif. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa sebagian penerima manfaat belum memiliki pengetahuan maupun keterampilan pengelolaan keuangan untuk memanfaatkan bantuan tunai sebagai modal usaha kecil. Akibatnya, dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi keluarga tetap terbatas, dan ketergantungan pada pinjaman informal masih terjadi, terutama di periode jeda penyaluran. Sebagaimana diungkapkan oleh SY (49) di Kawasan Pasar Ancol Kota Jambi mengatakan, *"Kalau uang bantuan masuk, kami tenang sebentar. Bisa bayar sekolah anak, beli beras. Tapi kalau habis, mau tak mau minjam lagi, soalnya belum ada usaha tambahan."* Hal senada disampaikan oleh AK (31) pendamping PKH di Kecamatan Pasar Jambi mengatakan *"Sebagian keluarga penerima memang belum siap diarahkan usaha. Banyak yang takut gagal, jadi uangnya habis buat belanja sehari-hari, bukan diputar jadi usaha kecil."*.

Temuan ini sejalan dengan temuan Rajesh et al. (2023) yang menegaskan bahwa *cash transfer programs* seringkali menurunkan beban pinjaman jangka pendek, tetapi tanpa integrasi dengan literasi keuangan, pelatihan usaha, dan akses modal bergulir, keluarga miskin cenderung tetap rentan berhutang di masa mendatang. Penelitian serupa di Meksiko dan Filipina (Pellerano & Barca, 2016; Angeles et al., 2019) juga memperlihatkan pola yang sama yakni transfer tunai efektif mengurangi pinjaman konsumsi, tetapi tidak cukup mendorong penerima ke jalur kewirausahaan jika tidak ada strategi pendukung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program PKH, BLT, dan BSU di Kota Jambi berhasil mengurangi beban pinjaman konsumsi, namun belum optimal membangun kemandirian ekonomi, serta kurangnya pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan membuat bantuan tunai belum dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif.

Dengan demikian, PKH (Program Keluarga Harapan) cenderung lebih terarah karena penyalurannya bersifat rutin dan memiliki komponen *conditional cash transfer* (bersyarat pada kehadiran sekolah, kesehatan anak). Meski demikian, nominalnya seringkali masih minim untuk diolah menjadi modal usaha produktif. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa bantuan tunai (baik PKH, BLT, maupun BSU) pada dasarnya berfungsi efektif sebagai penyangga kebutuhan dasar rumah tangga dalam jangka pendek.

SIMPULAN

1. Kontinuitas penyaluran bantuan tunai relatif baik, meskipun masih terdapat jeda teknis di beberapa periode penyaluran. Bagi rumah tangga rentan, keberlanjutan jadwal pencairan dana sangat penting untuk menjaga stabilitas pengeluaran dasar.
2. Dari sisi nominal, bantuan PKH, BLT, dan BSU terbukti mampu menutupi sebagian besar kebutuhan konsumsi pokok, seperti pangan dan biaya sekolah. Namun demikian, nominal yang terbatas dan tidak disertai dengan dukungan penambahan pendapatan lain membuat sebagian rumah tangga masih terpaksa meminjam di masa kebutuhan darurat.
3. Ditemukan bahwa mayoritas penerima manfaat mengalami perubahan pola pinjaman. Frekuensi meminjam menurun, terutama untuk konsumsi harian, tetapi belum sepenuhnya hilang ketika terjadi keterlambatan pencairan atau pengeluaran tak terduga.
4. Di tingkat persepsi, sebagian besar informan merasa terbantu secara jangka pendek tetapi belum memiliki keyakinan penuh bahwa program ini dapat mengangkat kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Dengan kata lain, perlindungan sosial tunai masih belum sepenuhnya mengarah pada transformasi kemandirian ekonomi rumah tangga miskin.

Saran

Hasil studi ini menggarisbawahi pentingnya integrasi dan optimalisasi program perlindungan sosial seperti PKH, BLT, dan BSU dalam menekan ketergantungan masyarakat rentan terhadap pinjaman konsumtif, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Jambi. Oleh karena itu, disarankan agar kebijakan bantuan sosial tidak hanya berfokus pada transfer tunai semata, tetapi diarahkan pula pada pendekatan pemberdayaan produktif yang berbasis komunitas dan didukung oleh literasi keuangan yang memadai. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarprogram, memperbarui data penerima secara berkala, dan membangun sistem pemantauan berbasis partisipasi untuk memastikan efektivitas intervensi. Selain itu, perluasan akses terhadap lembaga keuangan mikro formal yang aman dan terjangkau dapat menjadi solusi alternatif dalam menghindari jeratan pinjaman informal berbunga tinggi. Di samping itu, pendekatan geospasial berbasis data kerentanan wilayah juga perlu dipertimbangkan agar kebijakan sosial menjadi lebih kontekstual, tepat sasaran, dan mampu mengatasi akar struktural dari kerentanan ekonomi rumah tangga miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson. M. (2012). *Economics, Steady State*. University of Maine: Research Gate.

Angeles, G., de Hoop, J., Handa, S., & Gitter, S. (2019). *Reducing child labor through social protection: Evidence from the Philippines*. *Journal of Development Economics*, 141.

Arham, M.A., Mahyudin H., Rezkiawan T., & Citra A.K. (2024). Can fiscal transfers effectively reduce poverty in the Gorontalo Province?. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 11(6), 449-464.

Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Schmidt, T., & Jer, E. (2016). Cash transfers: What does the evidence say? A rigorous review of impact and the role of design and implementation features". ODI.

Browne, J., & Immervoll, H. (2017). *Mechanics of Wage Subsidies*. IZA Institute of Labor Economics.

Daly, H.E. (1980). Introduction to *Essays toward a steady-state economy*. In Herman Daly (Ed.), *Economics, ecology, ethics: Essays toward a steady-state economy.* San Francisco: W. H. Freeman.

Davis, B., Handa, S., Hypher, N., Rossi, N., Winters, P., & Yablonski, J. (2016). *From Evidence to Action: The Story of Cash Transfers and Impact Evaluation in Sub-Saharan Africa*. Oxford University Press.

Fiszbein, A., & Schady, N. (2009). *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*. World Bank.

Handa, S., & Davis, B. (2006). The experience of conditional cash transfer in Latin America and the Caribbean. *Development Policy Review*, 24, 513-536.

Hanlon, J., Barrientos, A., & Hulme, D. (2010). *Just Give Money to the Poor: The Development Revolution from the Global South*. Kumarian Press.

Halim, S., Desminar., Mursal., Elma R.Y., & Ros D. (2024). Community understanding of obligations as a recipient of PKH assistance in the perspective of Islamic law. *Al-Manhaj*, 6(2), 325-342.

Pelham, L. (2007). *The dynamics of cash transfers in low-income contexts*. ODI Working Paper.

Pellerano, L., & Barca, V. (2016). *Does one size fit all? The conditions for conditionality in cash transfers*. *Journal of Development Effectiveness*, 8(1).

Rajesh, K., Smriti B., Shashank B., Aadil A.I., & Anand P.R. (2023). Financial aid schemes and access for the underprivileged. *JETIR*, 10(5), 312-323.

Rossevelt, F.A. (2023). Analysis of Village Direct Cash Assistance (BLT) Program Evaluation in an effort to improve community welfare in the Village of Simpang Kiri, Tenggulun District, Aceh Tamiang Regency. *Journal of Management Analytical and Solution*, 3(3), 88-96.

UNDP. (2022). *Human Development Report 2022*. United Nations Development Programme.